LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Maret 2025

JUDUL

"Tata Kelola Program Kepemudaan di Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis

Bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

Tim Ahli

I Wayan Subamia, SE

Anggota Tim Pengendali Mutu

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang- Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam atau infrastruktur fisik semata, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda. Pemuda merupakan aset strategis daerah yang memiliki peran penting dalam mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai agen perubahan, pemuda diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman, termasuk isu-isu global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan krisis sosial.

Di Kabupaten Klungkung, potensi pemuda sangat besar dan beragam. Tercatat banyak organisasi kepemudaan yang aktif dalam kegiatan sosial, budaya, olahraga, kewirausahaan, serta pelestarian lingkungan. Karang taruna, sekaa teruna, komunitas seni, organisasi keagamaan, hingga inisiatif komunitas berbasis desa menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas sosial dan memperkuat modal sosial masyarakat. Namun, peran mereka dalam pembangunan daerah masih belum optimal karena belum adanya tata kelola yang terstruktur dan berkelanjutan.

Selama ini, program-program kepemudaan di Kabupaten Klungkung masih bersifat parsial, seremonial, dan cenderung bergantung pada satu OPD tertentu (misalnya Disdikpora atau Kesbangpol). Padahal isu kepemudaan bersifat lintas sektor—menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan ketahanan budaya. Tidak adanya sistem koordinasi antarlembaga dan minimnya data pemuda menyebabkan program yang dirancang kerap tidak tepat sasaran dan tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, belum tersedia sistem pendataan dan pemetaan potensi kepemudaan yang

berbasis kewilayahan. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan fasilitasi antara desa-desa yang aktif dengan desa-desa yang pasif. Ketiadaan perencanaan jangka panjang khusus kepemudaan juga membuat penganggaran bersifat reaktif, tidak konsisten dari tahun ke tahun, dan sangat tergantung pada inisiatif personal maupun kekuatan politis sesaat.

Sementara itu, tantangan sosial yang dihadapi generasi muda semakin kompleks, termasuk tingginya angka pengangguran terbuka pemuda, risiko penyalahgunaan narkoba, radikalisme digital, hingga rendahnya literasi keuangan dan literasi kewirausahaan. Dalam konteks ini, perlu sebuah sistem tata kelola yang tidak hanya mengkoordinasikan program, tetapi juga mampu membangun ekosistem pendukung untuk pengembangan kapasitas dan kepemimpinan pemuda di semua lini.

RPJPD Kabupaten Klungkung 2025–2045 secara eksplisit menekankan pentingnya transformasi sosial dan tata kelola yang adaptif, inklusif, serta kolaboratif. Salah satu wujud implementatif dari misi tersebut adalah mendorong peran pemuda sebagai aktor utama pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan strategis pengembangan kepemudaan harus menjadi agenda prioritas, dengan pendekatan berbasis data, berbasis komunitas, dan dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BRIDA Kabupaten Klungkung memandang penting untuk menyusun sebuah program inovatif yang mampu memperbaiki tata kelola program kepemudaan secara menyeluruh. Inovasi ini tidak hanya akan menjawab tantangan kelembagaan dan koordinasi, tetapi juga menjadi instrumen yang memastikan pemuda Klungkung tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang turut merancang masa depan daerahnya secara berkelanjutan.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud;

Menginisiasi model inovasi kebijakan partisipatif yang menjamin keterwakilan dan keterlibatan aktif pemuda, perempuan, dan masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Klungkung.

Tujuan;

1. Membangun kerangka partisipasi inklusif dalam proses Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten.
2. Meningkatkan kapasitas kelompok pemuda, perempuan, dan adat dalam merumuskan dan mengadvokasi usulan program pembangunan.
3. Mewujudkan sistem perencanaan yang akomodatif terhadap kebutuhan kelompok rentan melalui kebijakan dan regulasi daerah.
4. Mendorong terciptanya ruang konsultasi publik yang terstruktur dan berkelanjutan.

II. Ide dan Gagasan

Tata Kelola Kepemudaan Klungkung merupakan sebuah kerangka inovatif yang dirancang untuk mewujudkan sistem pembinaan dan pemberdayaan pemuda yang terintegrasi, partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Sistem ini dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan

mendesak akan penguatan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah, dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data.

Inovasi ini bertujuan membangun ekosistem kepemudaan yang memungkinkan semua potensi generasi muda—baik dari desa hingga kota, dari sektor informal hingga komunitas kreatif—untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kerangka ini, tata kelola tidak hanya menyentuh aspek programatik, tetapi juga mencakup pemetaan kebutuhan riil pemuda, penguatan kelembagaan, peningkatan akses layanan, dan sistem apresiasi kinerja pemuda secara adil.

Dengan didukung oleh komitmen lintas perangkat daerah, partisipasi organisasi kepemudaan, serta dukungan regulasi yang kuat, tata kelola ini diharapkan mampu menjadikan pemuda sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Tata kelola kepemudaan ini diimplementasikan melalui enam komponen utama inovasi yang saling terhubung dan memperkuat satu sama lain.

1. Pemetaan Potensi dan Masalah Pemuda

Langkah awal dalam penguatan tata kelola kepemudaan adalah memastikan bahwa pemerintah memiliki data yang lengkap dan akurat terkait kondisi riil pemuda di setiap wilayah. Pemetaan ini menjadi fondasi bagi semua program berikutnya agar berbasis kebutuhan dan potensi nyata.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Survei sosial dan ekonomi pemuda berbasis desa dan kecamatan.
- FGD (Focus Group Discussion) dengan karang taruna, komunitas pemuda, dan pemuda rentan.
- Identifikasi potensi (bakat seni, minat kewirausahaan, literasi digital, dsb).
- Pemetaan masalah sosial pemuda (pengangguran, putus sekolah, pernikahan dini, dll). Penyusunan profil kepemudaan desa dan kecamatan sebagai living document.

Hasil pemetaan menjadi acuan penyusunan RIKP dan rujukan utama OPD dalam merancang intervensi program.

2. Forum Koordinasi Kepemudaan Daerah (FKKD)

Program dan kebijakan yang baik harus dikoordinasikan secara multisektor dan multipihak. FKKD menjadi lembaga koordinatif dan partisipatif yang menjembatani kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen pemuda.

Fungsi utama FKKD:

- Menjadi ruang koordinasi antara organisasi pemuda dan OPD teknis (Disdikpora, Bappeda, Kesbangpol, dll).
- Menyusun agenda tahunan pembinaan pemuda lintas sektor.
- Mengawal dan mengevaluasi implementasi program-program kepemudaan.
- Memberikan rekomendasi kebijakan kepada kepala daerah berdasarkan dinamika di lapangan.

Anggota FKKD terdiri dari:

- Perwakilan organisasi kepemudaan.
- Unsur pemerintah daerah (OPD).
- Dunia usaha, perguruan tinggi, dan tokoh adat.

3. Rencana Induk Kepemudaan Daerah (RIKP)

Sebagai dokumen strategis, RIKP akan menjadi peta jalan pengembangan

kepemudaan daerah dalam jangka menengah dan panjang. Dokumen ini akan mendorong sinkronisasi program antar OPD dan mendukung keberlanjutan program lintas periode kepemimpinan.

Isi utama RIKP meliputi:

- Visi dan misi pengembangan pemuda Klungkung. Strategi dan rencana aksi lima tahunan.
- Indikator keberhasilan dan prioritas program per sektor. Skema pembiayaan dan kemitraan strategis (pemerintah-swasta-komunitas).
- Panduan bagi desa/kelurahan dalam merancang program pemudanya.

Secara kelembagaan kelembagaan, ini dapat diterapkan dengan ditetapkan melalui Peraturan Bupati, agar memiliki kekuatan hukum dan dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD.

4. Youth Service Hub (YS Hub)

YS Hub adalah pusat layanan pemuda tingkat kecamatan yang menjadi simpul aktivitas pembinaan, pelatihan, dan pengembangan potensi pemuda. Hub ini mengurangi ketimpangan akses pembinaan antarwilayah.

Fasilitas dan layanan yang tersedia di YS Hub:

- Ruang pelatihan vokasional (digital, pertanian modern, tata rias, dsb).
- Inkubator bisnis pemuda dan ruang co-working.
- Galeri hasil karya dan produk pemuda.
- Klinik kepemudaan (konseling karier, motivasi, kesehatan mental). Ruang ekspresi seni dan budaya.

Model kelembagaan adalah dikelola bersama oleh kecamatan dan FKKD, didukung OPD teknis. Menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan, BUMDes, dan sektor swasta.

5. Sistem Insentif dan Kompetisi Inovasi Pemuda

Untuk menumbuhkan semangat inovasi dan menjangkau lebih banyak pemuda, dibutuhkan sistem penghargaan yang adil dan kompetitif. Sistem ini juga berfungsi sebagai media diseminasi praktik baik.

Skema program meliputi:

- Lomba “Inovasi Pemuda Desa” setiap tahun.
- Hibah pembinaan bagi organisasi pemuda yang memiliki program berdampak.
- Penilaian berbasis indikator: partisipasi, keberlanjutan, inklusivitas, dan kemitraan.
- Penganugerahan “Desa Ramah Pemuda” untuk desa yang mendukung pemberdayaan pemuda.

Dampak positif yang diharapkan dari kegiatan adalah:

- Meningkatkan motivasi dan kepemimpinan muda.
- Mempercepat replikasi program pemuda yang berhasil.

6. Tata Kelola Program Kepemudaan Terpadu

Akhir dari seluruh rangkaian inovasi ini adalah terbentuknya sebuah tata kelola yang kuat, terintegrasi, dan inklusif. Sistem ini memastikan bahwa pengelolaan kepemudaan tidak lagi bersifat sektoral dan sporadis.

Karakteristik Tata Kelola Terpadu:

- Berbasis data: Semua program dirancang berdasarkan hasil pemetaan.
- Berorientasi hasil: Mengutamakan

capaian nyata, bukan sekadar kegiatan.
- Partisipatif: Melibatkan pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- Berkelanjutan: Tidak bergantung pada pergantian kepala daerah atau OPD.

Hasil yang diharapkan adalah:

- Klungkung memiliki sistem pengembangan pemuda yang dapat diukur, direplikasi, dan ditingkatkan secara berkala.
- Pemuda Klungkung menjadi agen perubahan yang terintegrasi dalam agenda pembangunan daerah.

III. Rekomendasi

Untuk mewujudkan tata kelola kepemudaan yang terstruktur dan berdampak, BRIDA merekomendasikan:

1. Penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Kepemudaan dan Pembentukan Forum Koordinasi Kepemudaan Daerah (FKKD).
2. Penyusunan Rencana Induk Kepemudaan (RIKP) Kabupaten Klungkung 2025–2045 yang mengintegrasikan program dari seluruh OPD yang menyentuh sektor pemuda.
3. Pengembangan Youth Service Hub berbasis kecamatan untuk menjadi pusat layanan terpadu program pelatihan, advokasi, dan kreativitas pemuda.
4. Penguatan sistem pendataan dan pemantauan berbasis indikator pembangunan kepemudaan, dengan melibatkan BRIDA, Bappeda, dan Diskominfo.
5. Kemitraan strategis dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk mendukung pelatihan kewirausahaan dan program internship berbasis desa.
6. Alokasi anggaran afirmatif untuk program pengembangan kepemudaan dalam APBD tahunan.

Semarapura, 26 Mei 2025
Disahkan oleh:
Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-